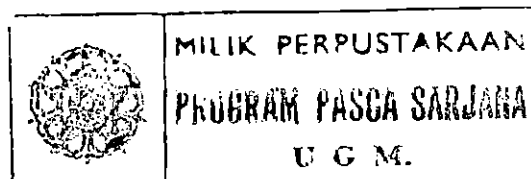


## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2002. *Bagian Keuangan Kabupaten Merauke menurut Perhitungan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Kabupaten Merauke (dalam beberapa seri penerbitan).
- Anonymous, 2002. *Nota Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002*. (dalam beberapa seri penerbitan)
- Arsyad, Lincoln, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. 2001. *Produk Domestik Regional Bruto 1997 – 2001*. (dalam beberapa seri penerbitan)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. 2001. *Kabupaten Merauke dalam Angka 2000*. (dalam beberapa seri penerbitan)
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, BPFE, Yogyakarta.
- Depdagri, 1991, Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Yang Nyata dan Bertanggungjawab, *Laporan Akhir Penelitian*, Litbang Depdagri dan Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Depdagri, 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.
- Depdagri, 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri Tahun 2002.
- Devas, N., Binder B., Booth, A., Davey, K., Kelly, R., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.



- Devas, N., 1997, Indonesian. What Do We Mean By Decentralization, *Public Administration and Development*, Vol. 17, 351 – 367.
- Davey K., J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press, Jakarta.
- Diharna, Koko, Ing Kosim, Rochimat, Yaya Suryadi, Herman, Kuswara, Sobari dan Hamim, 1990, Administrasi Keuangan, *Modul Kursus Keuangan, Pendidikan dan Latihan Propinsi Jawa Barat*, Bandung.
- Hirawan, Susiyati, B., 1996, Kebijakan Desentralisasi Dalam Rangka Meningkatkan PAD dan Pelayanan Kepada Masyarakat, *Makalah*, Dipresentasikan Dalam Seminar Nasional Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Tanggal 2 Agustus di Yogyakarta.
- Insukindro., Mardiasmo., Wahyu Widayat., Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Halim, Abdul, John Suprihanto dan Budi Purnomo, 1994, Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Meningkatkan PAD, *Buku I, Kursus Keuangan Daerah*, FE-UGM, Yogyakarta.
- Jaya, W.K., 1996, Analisis Potensi Keuangan Daerah, *Modul Program Penataran Manajemen Sektor Ekonomi Strategis*, Kerjasama Dirjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1995, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, Prisma, Jurnal No. 4: 3 – 17.
- Kaho, Yosef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Langkamau, Y., 1998, Analisa Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Studi Kasus di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, *Tesis S2*, PPS-UGM. (Tidak dipublikasikan)
- Mardiasmo dan Makhfatih, 2000, *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir*, Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU – SE UGM, Yogyakarta.
- Moneyzar, 1998, Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), *Wacana*, No. 1, 63-70.
- Mamesah, D.J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Pamudji, S., 1982, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Sidik, Machfud, 1999, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Serta Implikasinya Terhadap Pembiayaan Otonomi Daerah*, Yayasan Indonesia Forum, Jakarta.
- Slater, Richard, 1997, Approaches to Strengthening Local Government: Losson from Srilanka, *Public Administration and Development*, Vol. 17: 251 – 265.
- Sriyana, Jaka, 1999, Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. IV No. 1, 102 – 108.
- Todaro, M.P., 1997. *Economic Development*. Sixth Edition, Addison Wesley Long Man Limited, Edinburgh Gate, Harlow, England.
- Undang-undang No. 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sekretaris Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Sekretaris Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Wayong, J., 1975, *Administrasi Keuangan Daerah*, Ikhtiar, Jakarta.
- Widayat, Wahyu, 1994, Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2, 28 – 34.
- Widodo, Hg. Suseno T., 1990, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.